PUNGGAWA
SOCIAL INQUIRY

Punggawa Social Inquiry
Volume 1, Number 3, 2026
E-ISSN: 3164-015X
Open Access: punggawajournal.com/psi

Peran Komunikasi Islam dalam Membangun Moderasi Beragama di Masyarakat Multikultural

Atnan Putra[1], Nur Setiawati[2], A. Ahmad Dhani[3], A. Arsyal[4], Farid Aswar[5]
[1-5] Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Korespondensi: atnanputra7@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 29th, 2026
Revised Nov 7th, 2026
Accepted Nov 15th, 2026

Keyword:
Dialog antaragama; Komunikasi Islam; Masyarakat multicultural; Moderasi beragama; Toleransi.

ABSTRAK

Perbincangan tentang moderasi beragama cukup sering menempatkan toleransi sebagai tujuan, tetapi belum selalu menjelaskan apa yang terjadi dalam percakapan ketika orang berbeda keyakinan harus berhubungan satu sama lain. Artikel ini menelaah kontribusi komunikasi Islam terhadap moderasi beragama dengan perhatian pada kedudukan pendengar dan mutu dialog. Penelitian menggunakan studi kepustakaan naratif terhadap 21 sumber yang terdiri atas artikel jurnal, buku, dan dokumen kebijakan. Bahan kajian dikelompokkan menurut masalah etika pesan, hubungan komunikasi dengan indikator moderasi, serta praktik perjumpaan lintas agama. Hasil telaah memperlihatkan bahwa kejujuran dan kelembutan bertutur perlu disertai kesediaan mendengar agar penghormatan tidak berhenti pada pilihan kata. Penelitian tentang tradisi lokal menunjukkan bahwa kegiatan bersama dapat membuka kesempatan saling mengenal, meskipun kehadiran dalam kegiatan yang sama belum membuktikan kesetaraan komunikasi. Prasangka, ketimpangan posisi sosial, dan penyebaran pesan di ruang digital turut membatasi kontribusi tersebut. Komunikasi Islam dengan demikian lebih tepat dipahami sebagai landasan etis bagi berlangsungnya dialog yang mendukung moderasi, bukan sebagai penyebab tunggal perubahan sikap masyarakat.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai salam lintas agama menunjukkan bahwa hubungan antarumat beragama tidak selalu terganggu oleh persoalan besar. Satu ungkapan yang dimaksudkan sebagai penghormatan dapat dipahami dengan cara berbeda karena pembicara dan pendengar membawa pertimbangan keagamaan masing-masing. Dharta dkk. (2025) membahas perdebatan tersebut sebagai persoalan perundingan identitas di ruang publik, bukan sekadar perbedaan pilihan kata. Persoalan semacam ini dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Warga yang tinggal berdampingan perlu berkomunikasi meskipun mereka tidak mempunyai pandangan yang sama tentang suatu tindakan. Mereka dapat bekerja sama dalam urusan lingkungan, tetapi belum tentu sepakat ketika simbol atau ucapan keagamaan digunakan di hadapan kelompok lain. Keadaan itu memperlihatkan bahwa masalah moderasi juga menyangkut bagaimana makna suatu pesan dibicarakan bersama.

Moderasi beragama selama ini digunakan untuk menjelaskan sikap yang diperlukan ketika masyarakat menghadapi perbedaan keyakinan. Kementerian Agama RI (2019) merumuskannya melalui indikator komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal. Kerangka tersebut memberi batas yang cukup jelas bagi pembahasan perilaku sosial. Namun, seseorang dapat mengetahui pentingnya toleransi tanpa mampu menanggapi keberatan orang lain dalam percakapan. Pengetahuan tentang sikap yang baik belum dengan sendirinya menjelaskan cara sikap itu dijalankan. Seorang warga bahkan dapat menyetujui kerukunan sebagai tujuan bersama, tetapi masih kesulitan menentukan sikap ketika suatu ucapan dianggap menyinggung keyakinannya.

Ajaran komunikasi Islam memberi perhatian pada isi perkataan sekaligus cara seseorang memperlakukan lawan bicaranya. Hendra (2020) mengaitkan komunikasi Islam dengan etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah ketika membahas kebutuhan masyarakat multikultural. Shihab (2019) juga menjelaskan bahwa *wasathiyyah* tidak berarti mengambil posisi netral terhadap semua hal. Sikap moderat memerlukan pertimbangan yang sesuai dengan keadaan. Kedua pandangan ini dapat dipertemukan, tetapi hubungan keduanya tidak boleh dianggap selesai hanya dengan menyebut bahwa Islam menganjurkan tutur kata yang baik. Ketika orang berbeda keyakinan membicarakan masalah yang sensitif, pertanyaannya justru terletak pada apakah pembicara bersedia mendengarkan tanggapan yang tidak ia harapkan. Pertanyaan itu lebih sulit daripada sekadar meminta semua orang menjaga bahasa selama bertemu. Persoalan seperti ini tidak selesai hanya dengan penjelasan tentang sopan santun secara umum.

Fajri (2023) menempatkan empati dan penggunaan bahasa yang tidak diskriminatif sebagai bagian dari pola komunikasi yang mendukung dialog keagamaan. Dalam kajian lain, Ulfain dan Zahrani (2025) membahas komunikasi dakwah yang menyesuaikan diri dengan hubungan sosial masyarakat multikultural. Keduanya menolong pembaca memahami pentingnya pendekatan yang tidak menghakimi. Kendati demikian, menyebut suatu pesan sebagai komunikasi yang efektif belum menjawab bagaimana pendengar menafsirkan pesan tersebut. Pesan yang dirancang dengan bahasa ramah mungkin tetap diterima sebagai tekanan apabila pendengar tidak diberi kesempatan menyampaikan keberatan. Penjelasan tentang komunikasi Islam karenanya perlu menjangkau hubungan antara pihak yang berbicara dan pihak yang diminta menerima pesan. Di sinilah perbedaan antara kesantunan bahasa dan penghormatan yang sungguh dialami oleh pendengar menjadi penting.

Hubungan antarumat beragama juga dipelihara melalui kebiasaan lokal, bukan hanya melalui forum resmi. Agung dkk. (2024) menunjukkan peranan kearifan lokal bagi hubungan lintas agama di Malang. Jayadi dan Ridho (2024) menjelaskan praktik hidup bersama masyarakat Muslim, Buddha, dan Hindu melalui tradisi Pujawali di Lombok Utara. Kegiatan bersama memberi kesempatan bertemu tanpa selalu menempatkan perbedaan ajaran sebagai pokok percakapan. Akan tetapi, keberadaan tradisi itu sendiri belum menerangkan apakah semua peserta mempunyai ruang bicara yang sama.

Penelitian tentang hubungan lintas agama juga menunjukkan bahwa banyaknya perjumpaan tidak selalu sejalan dengan kualitas hubungan yang terbentuk. Kanas dkk. (2015), melalui penelitian pada mahasiswa Muslim dan Kristen di Indonesia, menemukan perbedaan hasil antara jumlah kontak dan mutu kontak antaragama. Sementara itu, Hermawan dan Matas (2024) menempatkan kebijakan moderasi dan inisiatif masyarakat dalam satu pembahasan tentang hubungan lintas agama. Keduanya mengingatkan bahwa pengalaman warga tidak dapat dijelaskan hanya dari keberadaan program atau frekuensi kegiatan. Orang yang hadir dalam acara yang sama masih mungkin merasa tidak didengar. Temuan ini menuntut perhatian pada proses komunikasi di dalam kegiatan, bukan hanya pada kegiatan yang tampak dari luar. Masalah ini makin penting ketika keberhasilan pertemuan hanya didasarkan pada laporan penyelenggara.

Masalah yang belum cukup terurai dalam kumpulan literatur tersebut bukanlah ketiadaan penelitian mengenai komunikasi dan moderasi beragama. Kajian komunikasi Islam memberi dasar tentang perilaku bertutur yang seharusnya dijaga, sedangkan penelitian lapangan menggambarkan hubungan sosial yang sudah berlangsung. Akan tetapi, jarak antara anjuran moral dan pengalaman pendengar masih sering dibiarkan sebagai asumsi. Tidak setiap pesan yang lembut membuat pihak lain merasa dihormati. Pertemuan yang berlangsung damai pun belum tentu memungkinkan orang menyatakan ketidaksetujuan. Celah ini penting karena moderasi beragama merupakan sikap sosial, sedangkan etika komunikasi pada mulanya merupakan pedoman bagi tindakan seseorang. Hubungan keduanya baru masuk akal apabila diperlihatkan proses yang menjadikan pendengar sebagai pihak yang dapat merespons, bukan semata sasaran penyampaian ajaran.

Artikel ini mengkaji bagaimana prinsip komunikasi Islam memberi landasan bagi dialog yang mendukung moderasi beragama dalam masyarakat multikultural Indonesia. Pembahasan diarahkan pada mutu hubungan antara pembicara dan pendengar, lalu diperiksa melalui temuan penelitian tentang perjumpaan lintas agama. Pertanyaan yang hendak dijawab ialah dalam keadaan apa etika komunikasi dapat membantu orang menyikapi perbedaan tanpa merendahkan pihak lain. Telaah ini tidak bermaksud membuktikan bahwa komunikasi Islam telah mengubah perilaku masyarakat tertentu. Kontribusinya lebih terbatas, yakni menjelaskan kaitan yang dapat dipertanggungjawabkan antara nilai komunikasi,

praktik dialog, dan batas sosial yang memengaruhi keduanya. Pembacaan ini tidak menghasilkan data baru tentang perilaku warga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pilihan ini sesuai dengan tujuan penelitian yang menafsirkan hubungan antara prinsip komunikasi Islam dan temuan tentang moderasi beragama, bukan mengukur sikap warga melalui survei. Telaah dilakukan secara naratif karena sumber yang digunakan mencakup tulisan konseptual dan penelitian lapangan dengan rancangan berbeda.

Bahan kepustakaan berjumlah 21 sumber yang mencakup 18 artikel ilmiah, dua buku, dan satu dokumen Kementerian Agama. Penelusuran dilakukan melalui Google Scholar, GARUDA, dan laman penerbit dengan menggunakan istilah pencarian yang berkaitan dengan komunikasi Islam dan moderasi beragama. Sumber yang diprioritaskan terbit pada 2019 hingga 2026, sedangkan karya lebih lama dipertahankan apabila diperlukan untuk landasan teori. Pemilihan didasarkan pada hubungan langsung dengan masalah penelitian serta kejelasan identitas publikasi. Informasi yang digunakan mengikuti isi sumber yang dapat diperiksa, baik abstrak maupun uraian artikel yang tersedia. Karena bentuk dan kedalaman bahan berbeda, hasil setiap penelitian tidak diperlakukan sebagai bukti yang sama kuat untuk semua klaim. Tidak ada penghitungan frekuensi temuan untuk menyatakan kecenderungan seluruh publikasi yang tersedia.

Analisis dilakukan dengan mencatat gagasan dan temuan yang berkaitan dengan etika pesan serta pengalaman komunikasi antarkelompok. Catatan kemudian dibaca kembali untuk menemukan kesesuaian dan perbedaan antara sumber. Pengelompokan tersebut memakai prinsip dasar analisis tematik yang dijelaskan Braun dan Clarke (2006), tanpa mengklaim telah menerapkan seluruh prosedur penelitian lapangan mereka. Pembacaan dilakukan terutama pada hubungan antara nilai komunikasi, kesempatan pendengar merespons, dan sikap yang dapat disebut moderat. Kesimpulan hanya dirumuskan pada tingkat penafsiran literatur. Artikel ini tidak menyajikan angka pengaruh atau temuan wawancara baru. Pembacaan silang digunakan untuk memeriksa apakah penjelasan normatif telah melampaui bukti yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Komunikasi Islam dan Kedudukan Pendengar

Perintah untuk berkata benar dalam Surah al-Ahzab ayat 70 kerap dibahas melalui konsep *qaulan sadidan*. Kebenaran di sini penting karena hubungan sosial dapat rusak ketika informasi mengenai kelompok lain disampaikan secara tidak tepat. Namun, persoalan komunikasi tidak selesai setelah pembicara merasa bahwa isi pesannya sudah benar. Pendengar masih perlu memahami maksud dan alasan yang digunakan. Hendra (2020) menempatkan komunikasi Islam sebagai komunikasi yang mempunyai tanggung jawab etis, bukan hanya kegiatan memindahkan informasi. Tanggung jawab tersebut menjadi lebih berat dalam masyarakat multikultural karena seseorang mungkin berbicara di hadapan orang yang tidak mempunyai rujukan keyakinan serupa. Cara menjelaskan pendapat perlu mempertimbangkan perbedaan tersebut tanpa menuntut pendengar terlebih dahulu menerima dasar keagamaan pembicara. Tanpa penjelasan semacam itu, pernyataan benar bisa terdengar seperti penilaian sepihak atas keyakinan orang lain.

Surah Taha ayat 44 memberi perhatian pada kelembutan perkataan melalui anjuran berbicara baik bahkan ketika menghadapi pihak yang tidak sependapat. Prinsip *qaulan layyinan* karena itu tidak cukup dimaknai sebagai suara pelan atau pemilihan kata yang sopan. Ucapan yang tenang masih dapat merendahkan orang lain apabila hanya dipakai untuk menutup perdebatan. Kelembutan menjadi bermakna ketika orang yang berbeda pandangan tidak diperlakukan sebagai pihak yang harus dipermalukan. Perbedaan ini terlihat ketika seseorang berkata sopan sambil terus memotong jawaban orang lain. Pilihan kata memang berubah, tetapi kesempatan untuk saling memahami belum tentu bertambah.

Kesesuaian cara penyampaian dengan keadaan pendengar dapat dibaca melalui perintah berdakwah dengan hikmah dalam Surah an-Nahl ayat 125. Prinsip ini memberi alasan untuk memperhatikan bahasa yang dikenal masyarakat dan pengalaman yang memengaruhi penafsiran mereka. Perhatian pada keadaan penerima pesan bukan berarti pendakwah harus mengubah keyakinan agar disukai. Hal yang lebih mendasar ialah menghindari anggapan bahwa satu cara berbicara pasti

sesuai untuk semua orang. Dalam percakapan yang melibatkan perbedaan agama, penjelasan yang dapat dipahami biasanya lebih berguna daripada istilah yang hanya dimengerti kelompok sendiri. Pendengar pun dapat menilai suatu pesan secara lebih adil apabila maksudnya tidak disamarkan oleh ungkapan yang menyinggung.

Ketiga prinsip tersebut sering diletakkan sebagai daftar sifat yang semestinya dimiliki seorang komunikator Muslim. Bentuk penjelasan demikian berguna sebagai pengantar, tetapi belum cukup bagi analisis hubungan sosial. Pemahaman terhadap keadaan nyata diperlukan ketika menjelaskan moderasi. Hal serupa berlaku bagi etika komunikasi. Kejujuran tidak bisa dinilai hanya dari keyakinan pembicara tentang kebenaran pesannya, karena informasi faktual masih perlu diperiksa. Sikap lembut juga tidak dapat dinyatakan berhasil tanpa mengetahui bagaimana pendengar memahaminya. Landasan normatif memberi arah bagi tindakan, sedangkan akibat sosialnya baru dapat dibahas ketika ada informasi tentang hubungan yang berlangsung.

Orang yang mendengarkan pesan keagamaan memiliki pengalaman dan kepentingan yang mungkin berbeda dari pembicaranya. Dalam komunikasi satu arah, perbedaan itu kerap dianggap sebagai hambatan penyampaian pesan. Padahal, kesempatan mengajukan pertanyaan dapat membantu pembicara mengetahui bagian mana yang menimbulkan salah pengertian. Menghormati pendengar berarti mengakui bahwa tanggapannya bukan gangguan, melainkan bagian dari proses komunikasi yang perlu diperhitungkan. Mendengar jawaban yang tidak sesuai harapan juga menuntut kesabaran. Pendakwah dapat tetap menyatakan pendiriannya, namun ia tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa keberatan orang lain berasal dari niat buruk atau penolakan terhadap seluruh pesan agama.

Penggunaan bahasa yang inklusif dan kesediaan mendengarkan mempunyai arti penting dalam dialog moderasi beragama. Gagasan tersebut perlu dibaca lebih jauh daripada ajakan untuk berbicara santun. Ketika suatu pertemuan hanya menyediakan waktu bagi tokoh tertentu, para peserta mungkin memahami bahwa perbedaan pendapat sebaiknya disimpan sendiri. Suasana pertemuan bisa tetap tertib, tetapi tidak tersedia cukup informasi untuk mengatakan bahwa para peserta saling memahami. Pembicara yang menjelaskan alasan pendapatnya lalu mendengarkan tanggapan yang berbeda memberi peluang lebih besar bagi terbentuknya pengertian. Hasilnya tetap tidak harus berupa persetujuan. Dalam masyarakat multikultural, orang dapat mempertahankan keyakinan masing-masing sambil menghindari tindakan yang merugikan hubungan bertetangga.

Kegiatan dakwah pada masyarakat beragam tidak selalu berlangsung dalam situasi ketika seorang pendakwah berbicara kepada jamaah yang sepaham. Ulfain dan Zahrani (2025) melaporkan pentingnya pendekatan dialogis dalam komunikasi dakwah yang mereka teliti. Pendekatan itu berkaitan dengan pemahaman terhadap kebudayaan dan hubungan sosial setempat. Namun, hasil penelitian pada lokasi tertentu tidak dapat langsung dipakai sebagai bukti bahwa semua bentuk dialog akan berhasil. Pendakwah masih perlu mengetahui apakah warga merasa dapat menyampaikan tanggapan tanpa takut dianggap menentang ajaran. Dalam situasi ini, ukuran komunikasi yang baik bukan hanya kemampuan pembicara menarik perhatian. Kesediaan mendengarkan keluhan yang mungkin tidak menyenangkan justru memperlihatkan apakah penghormatan terhadap pendengar benar-benar diterapkan. Hal semacam ini jarang terlihat jika evaluasi hanya mengandalkan laporan kegiatan dari penyelenggara.

Etika komunikasi Islam mempunyai arti sosial ketika dipraktikkan sebagai hubungan dua arah. Kebenaran pesan menjaga pembicara dari penyampaian informasi yang menyesatkan, tetapi pendengar juga perlu memperoleh kesempatan memeriksa maksud yang disampaikan. Kelembutan bertutur menjaga agar perbedaan tidak segera berubah menjadi penghinaan. Kesediaan menerima tanggapan membuat kedua prinsip tersebut dapat diuji dalam percakapan yang nyata. Sebab itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa pesan yang terdengar baik dengan sendirinya sudah menciptakan sikap moderat.

Proses Komunikasi dalam Penguatan Moderasi Beragama

Empat indikator moderasi beragama yang digunakan Kementerian Agama RI (2019) tidak mempunyai hubungan yang sama dengan etika komunikasi Islam. Toleransi berkaitan langsung dengan cara seseorang memberi tempat bagi perbedaan. Antikekerasan dapat diamati antara lain dari penolakan terhadap penghinaan atau ancaman dalam percakapan. Komitmen kebangsaan memiliki cakupan lebih luas karena menyangkut penerimaan terhadap kehidupan bernegara. Penerimaan terhadap tradisi lokal pun tidak dapat disamakan dengan kesediaan menggunakan bahasa yang akrab bagi masyarakat. Pembahasan komunikasi perlu mempertahankan perbedaan itu. Satu anjuran untuk berkata baik tidak

cukup untuk menjelaskan seluruh indikator secara sekaligus. Perbedaan itu menentukan batas klaim yang dapat dibuat.

Toleransi dalam komunikasi tampak ketika seseorang membiarkan pihak lain menyatakan keyakinannya tanpa harus menyetujui isi keyakinan tersebut. Perdebatan salam lintas agama yang dibahas Dharta dkk. (2025) memperlihatkan mengapa batas ini tidak selalu mudah dijaga. Sebagian orang menafsirkan salam sebagai ungkapan penghormatan sosial, sedangkan pihak lain membacanya dari sudut kewajiban keagamaan. Perbedaan penafsiran itu tidak seharusnya segera dijadikan bukti bahwa salah satu pihak menolak kerukunan. Yang perlu diamati adalah bagaimana mereka menyampaikan alasan dan menanggapi keberatan. Sikap toleran menjadi lebih terlihat ketika ketidaksetujuan dinyatakan tanpa merendahkan hak pihak lain untuk memegang pandangannya.

Kejujuran dalam menyampaikan informasi mempunyai hubungan yang agak berbeda dengan toleransi. Orang dapat bersikap ramah, tetapi tetap menyebarkan cerita keliru tentang kelompok agama lain. *Qaulan sadidan* mengingatkan bahwa sikap menghormati tidak cukup apabila pengetahuan yang digunakan untuk menilai orang lain tidak diperiksa. Pesan yang keliru dapat memperbesar jarak sosial sekalipun dikemas dalam bahasa yang tenang. Pemeriksaan informasi menjadi bagian dari tanggung jawab komunikator, terutama ketika pesan menyangkut kelompok yang tidak hadir untuk memberi penjelasan.

Prinsip bertutur lembut dapat mendukung sikap antikekerasan karena konflik tidak jarang diawali dengan kata yang mempermalukan pihak lain. Namun, tidak semua perbedaan yang diucapkan dengan tegas merupakan bentuk kekerasan. Orang tetap berhak menyampaikan kritik sepanjang tidak menggunakan ancaman atau penghinaan. Harmadi dkk. (2025) membahas dialog lintas agama sebagai pekerjaan sosial yang masih menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya. Perhatian pada bahasa menjadi relevan di sini, tetapi tidak boleh berubah menjadi tuntutan agar warga yang memiliki masalah hanya diam demi menjaga suasana. Perselisihan dapat ditangani secara wajar apabila kedua pihak memperoleh tempat untuk menerangkan persoalannya.

Komitmen kebangsaan tidak dapat ditarik langsung dari kesantunan berbahasa. Seseorang mungkin memiliki kemampuan berbicara yang baik, tetapi belum tentu memahami hak warga lain dalam kehidupan bernegara. Hefner (2000), dalam pembahasannya mengenai Islam sipil di Indonesia, menunjukkan pentingnya kehidupan asosiasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokratisasi. Temuan tersebut memberi konteks bahwa komunikasi keagamaan berkaitan dengan hubungan sosial yang lebih luas. Komunikasi Islam dapat membantu memperkuat kebiasaan menyelesaikan perbedaan melalui percakapan, tetapi klaim bahwa kebiasaan itu otomatis menghasilkan komitmen kebangsaan memerlukan penelitian lain. Pembatasan ini diperlukan agar kajian tidak menjadikan semua perilaku baik sebagai akibat dari satu bentuk komunikasi.

Penerimaan terhadap budaya lokal juga perlu dijelaskan secara hati-hati. Bahasa yang akrab dengan kebiasaan masyarakat dapat membuat pesan lebih mudah dipahami. Namun, memakai ungkapan lokal bukan bukti bahwa seseorang menerima seluruh praktik budaya setempat. Ada tradisi yang dinilai berbeda oleh kelompok keagamaan tertentu. Dalam keadaan tersebut, komunikasi yang menghormati pihak lain dapat membuka pembicaraan mengenai alasan keberatan, tanpa menuntut semua peserta menyetujui satu penilaian keagamaan. Jika perbedaan pandangan disampaikan secara terbuka, warga setidaknya dapat mengetahui alasan mengapa satu kelompok bersedia terlibat dalam suatu kegiatan budaya, sementara kelompok lain memilih bentuk keterlibatan yang berbeda.

Perjumpaan antarkelompok dapat membantu mengurangi prasangka, tetapi hubungan tersebut memiliki syarat yang perlu diperhatikan. Pettigrew dan Tropp (2006) dalam telaah meta-analisis tentang kontak antarkelompok menemukan bahwa kontak pada umumnya berkaitan dengan penurunan prasangka. Kajian itu tidak secara khusus menguji komunikasi Islam. Karena itu, temuan mereka lebih tepat digunakan sebagai pembanding untuk memahami arti kesempatan berinteraksi, bukan sebagai bukti keberhasilan suatu pendekatan dakwah. Penilaian terhadap komunikasi tetap perlu bertumpu pada konteks dan pengalaman kelompok yang terlibat.

Kanas dkk. (2015) memberikan gambaran yang lebih dekat dengan hubungan antaragama di Indonesia. Penelitian mereka pada mahasiswa Muslim dan Kristen di Ambon serta Yogyakarta menemukan bahwa banyaknya kontak tidak menunjukkan hubungan yang sama bagi kelompok mayoritas dan minoritas. Mutu kontak lebih konsisten berhubungan dengan sikap terhadap kelompok lain. Perbedaan ini penting karena kegiatan lintas agama kerap dinilai berhasil melalui jumlah peserta atau banyaknya pertemuan. Padahal, pihak yang sering hadir dapat tetap merasa dipandang rendah.

Kontak yang berlangsung berulang baru mempunyai arti lebih besar ketika para peserta memperoleh pengalaman yang cukup baik untuk memperbaiki penilaian mereka terhadap pihak lain.

Hubungan antara etika komunikasi dan moderasi beragama lebih masuk akal dijelaskan sebagai proses yang bertahap. Nilai kejujuran mengarahkan pembicara untuk tidak menyampaikan informasi keliru. Cara bertutur yang menghargai orang lain membuka kemungkinan adanya tanggapan. Sesudah itu, pengalaman berkomunikasi dapat membantu para pihak melihat bahwa perbedaan keyakinan tidak selalu menghalangi kerja sama. Namun, sikap moderat tidak bisa dipastikan hanya dari satu percakapan yang berlangsung tanpa pertengkaran. Dibutuhkan bukti tentang perilaku setelah perjumpaan, termasuk ketika mereka kembali menghadapi persoalan yang menimbulkan ketidaksetujuan.

Dialog Keseharian dan Batas Kontribusi Komunikasi Islam

Hubungan antaragama sering dirawat melalui kegiatan yang tidak dirancang sebagai forum dialog resmi. Agung dkk. (2024) meneliti komunitas di Malang yang mengandalkan kearifan lokal dan peranan pemimpin masyarakat untuk mempertahankan hubungan lintas agama. Salah satu unsur pentingnya ialah pengalaman hidup bersama yang telah berlangsung lama. Temuan itu tidak menjadikan tradisi lokal sebagai penyelesaian bagi semua persoalan, tetapi menunjukkan bahwa komunikasi mempunyai tempat dalam hubungan sehari-hari. Warga dapat saling mengenal dari kegiatan lingkungan sebelum mereka berbicara tentang perbedaan keyakinan. Hubungan semacam ini memberi dasar yang lebih nyata bagi sikap saling percaya dibandingkan pertemuan yang hanya berlangsung satu kali.

Di Lombok Utara, Jayadi dan Ridho (2024) meneliti praktik moderasi pada masyarakat Muslim, Buddha, dan Hindu yang terlibat dalam tradisi Pujawali. Partisipasi warga dalam kegiatan bersama memperlihatkan bahwa penghormatan terhadap keyakinan lain dapat tumbuh dalam lingkungan sosial yang mereka kenal. Namun, temuan dari satu desa tidak menjelaskan secara langsung keadaan wilayah lain. Tradisi yang berhasil menjadi ruang perjumpaan di suatu tempat mungkin tidak memiliki arti serupa bagi masyarakat dengan riwayat hubungan yang berbeda.

Kegiatan bersih desa memberi ruang bagi warga untuk saling memahami tanpa menjadikan ajaran agama sebagai topik utama. Hidayatullah dkk. (2026) membahas hubungan itu dalam penelitian mereka. Kegiatan tersebut menyediakan kesempatan bagi warga untuk bekerja bersama dan membangun kedekatan melalui pengalaman yang berulang. Ada orang yang mungkin tidak nyaman ketika diminta menjelaskan keyakinannya di depan forum resmi, tetapi lebih mudah mengenal tetangga melalui pekerjaan yang dilakukan bersama. Kendatipun demikian, kedekatan dalam kegiatan budaya tidak boleh langsung dianggap sebagai kesepakatan teologis. Nilai pentingnya justru terletak pada kemungkinan bekerja sama sambil tetap mengetahui bahwa keyakinan masing-masing tidak sama. Bentuk keterlibatan warga pun tidak dapat diseragamkan.

Aturan hidup bersama dapat lahir dari pembicaraan mengenai kebiasaan yang berpotensi menyinggung tetangga. Jamal dkk. (2026) menemukan keadaan itu di Nggeru Kopa. Hubungan sosial dipelihara melalui aturan yang disepakati warga agar kehidupan bersama tidak terganggu. Dalam temuan semacam ini, dialog tidak selalu berbentuk pertukaran pendapat tentang ajaran agama. Ada pula perundingan mengenai cara berperilaku ketika satu kebiasaan dapat menyinggung tetangga. Kesepakatan warga memperoleh arti apabila dibuat dengan mengetahui kepentingan masing-masing pihak. Bila aturan ditetapkan tanpa memberi ruang kepada kelompok yang kurang berpengaruh, ketenangan yang tampak belum tentu berarti semua orang menerimanya dengan sukarela. Tidak semua persoalan selesai melalui musyawarah.

Kunjungan antarwarga memberi peluang untuk mengenal orang lain di luar pertemuan resmi. Anas dkk. (2026) menjelaskannya melalui kajian tradisi anjangsana. Kegiatan tersebut dilakukan dalam hubungan sosial yang sudah saling mengenal, sehingga pertemuan tidak berhenti sebagai acara seremonial. Orang memiliki kesempatan melihat bagaimana tetangganya menjalani kehidupan sehari-hari. Penelitian itu juga mengingatkan bahwa hubungan baik membutuhkan kebiasaan yang dipelihara. Komunikasi tidak dapat hanya bergantung pada pesan yang diberikan ketika muncul konflik. Keakraban yang dibangun sebelum perselisihan mungkin membantu warga lebih bersedia mendengarkan penjelasan satu sama lain.

Kegiatan warga di Flores menunjukkan bagaimana hubungan lintas agama dipelihara tanpa selalu membicarakan perbedaan ajaran. Djainudin (2022) mengamati praktik tersebut. Pengalaman itu membantu melihat bahwa dialog tidak harus selalu berbentuk percakapan resmi. Kegiatan bersama bisa

memberi kesempatan mengenali kebiasaan orang lain tanpa harus mengubah keyakinan sendiri. Walaupun demikian, tidak semua wilayah memiliki riwayat hubungan yang serupa. Penjelasan mengenai kerukunan perlu tetap memperhatikan keadaan sosial yang melatarinya. Jika penelitian dari Flores dibandingkan dengan kajian di daerah lain, yang dapat dipertahankan bukan dugaan adanya satu pola kerukunan nasional, melainkan pentingnya kesempatan bertemu yang sesuai dengan kehidupan warga setempat.

Kegiatan bersama dapat pula menutupi persoalan apabila hanya dinilai dari suasana pertemuan yang tertib. Seseorang mungkin ikut kerja bakti karena merasa berkewajiban hadir, tetapi memilih diam ketika pendapatnya berbeda dengan tokoh setempat. Situasi semacam itu tidak dapat dibaca sebagai bukti bahwa hubungan sudah setara. Dalam komunikasi Islam, penghormatan terhadap pendengar perlu dilihat dari kesempatan menyampaikan tanggapan dan cara keberatan itu diterima. Pertemuan yang kadang memunculkan perdebatan secara terbuka belum tentu lebih buruk daripada acara yang tampak damai. Perlu diperiksa apakah peserta tetap dapat saling menghormati setelah perselisihan disampaikan. Bila tidak, kesalahpahaman bisa kembali muncul pada kesempatan berikutnya.

Adiprasetya (2024) mengkritik moderasi beragama yang terlalu bergantung pada agenda dari atas dan menawarkan perhatian pada hubungan persahabatan lintas agama. Hermawan dan Matas (2024) juga memperlihatkan pentingnya inisiatif masyarakat dalam hubungan antaragama. Kedua kajian tersebut tidak secara langsung menguji prinsip *qaulan sadidan* atau *qaulan layyinan*. Meski begitu, pembahasannya membantu menjelaskan mengapa pesan moral memerlukan hubungan yang lebih lama daripada satu kegiatan penyuluhan. Orang lebih mungkin bersedia mendengarkan kritik dari pihak yang selama ini memperlakukannya dengan hormat.

Ruang digital membuat hubungan antara pesan dan pendengar semakin sukar diperkirakan. Lim (2017) menjelaskan bagaimana pengelompokan pengguna media sosial berdasarkan pandangan yang sama dapat memperkuat polarisasi di Indonesia. Pesan yang disampaikan dengan maksud tertentu dapat beredar dalam potongan singkat, lalu dinilai oleh orang yang tidak mengetahui keadaan pembicara. Kejujuran informasi karena itu tidak cukup dijaga ketika pesan pertama kali dibuat. Mereka yang meneruskan potongan ceramah juga perlu mempertimbangkan apakah konteksnya berubah. Kesantunan dalam satu rekaman tidak otomatis mencegah penyebaran tafsir yang memusuhi kelompok lain. Pada saat yang sama, pendengar tidak selalu mempunyai kesempatan meminta penjelasan langsung dari pembicara.

Perbedaan posisi sosial menjadi batas lain yang kerap tidak terlihat pada pembahasan tentang komunikasi yang baik. Kelompok dengan pengaruh lebih besar biasanya memiliki kesempatan lebih luas untuk menentukan topik dan aturan pertemuan. Kelompok yang merasa tidak aman dapat memilih tidak menyampaikan keberatan. Dalam kondisi demikian, dialog tidak serta-merta menghasilkan pengertian bersama. Penelitian Kanas dkk. (2015) menunjukkan bahwa pengalaman kontak antarkelompok perlu dibaca dengan memperhatikan kedudukan dan persepsi ancaman. Komunikasi Islam dapat menawarkan etika untuk memperlakukan pendengar secara adil, tetapi ketimpangan kesempatan berbicara tetap membutuhkan perubahan dalam cara pertemuan diselenggarakan. Masalah seperti itu tidak selesai hanya dengan menjaga nada suara.

Kebutuhan untuk mengukur mutu komunikasi tidak sama dengan keharusan mencapai kesepakatan dalam setiap pembicaraan. Warga dapat tetap berbeda pendapat tentang praktik keagamaan tertentu. Pertanyaan yang lebih penting ialah apakah mereka mampu menyampaikan alasan tanpa saling mengancam dan masih bersedia bekerja sama dalam urusan sosial. Dialog lintas agama menghadapi persoalan pelaksanaan, bukan hanya persoalan rumusan nilai. Ukuran seperti kesediaan melanjutkan hubungan setelah perbedaan akan lebih berguna bagi penelitian lanjutan dibandingkan jumlah acara yang terlaksana.

Studi kepustakaan ini belum dapat memastikan apakah perubahan sikap benar-benar terjadi setelah seseorang mendengar pesan dakwah tertentu. Literatur yang dibaca berasal dari lokasi dan rancangan penelitian yang tidak seragam. Sebagian membahas prinsip etis, sedangkan penelitian lain berangkat dari pengalaman masyarakat dalam tradisi lokal. Hubungan yang dirumuskan di sini karena itu merupakan hasil penafsiran atas sumber, bukan hubungan sebab akibat yang sudah diuji. Penelitian lapangan dapat menelaah percakapan yang terjadi ketika warga tidak sepakat, termasuk siapa yang berbicara dan siapa yang memilih diam. Pengamatan seperti itu diperlukan sebelum kontribusi komunikasi Islam terhadap perubahan perilaku moderat dapat dinyatakan dengan lebih kuat.

KESIMPULAN

Komunikasi Islam dapat mendukung moderasi beragama apabila prinsip berkata benar dan bertutur lembut diwujudkan dalam hubungan yang memberi tempat bagi pendengar. Nilai etis tersebut belum cukup ketika pembicara hanya menyampaikan nasihat tanpa memahami tanggapan pihak lain. Telaah ini menunjukkan bahwa ruang dialog memiliki arti penting karena orang dapat mempertahankan keyakinannya sekaligus belajar menanggapi perbedaan tanpa merendahkan. Penelitian tentang hubungan lintas agama di sejumlah daerah memperlihatkan peranan kegiatan bersama dalam membuka perjumpaan yang berulang. Namun, perjumpaan itu sendiri tidak boleh disamakan dengan sikap moderat apabila mutu hubungan di antara pesertanya belum diketahui.

Kontribusi komunikasi Islam memiliki batas yang perlu diakui. Prasangka yang sudah lama terbentuk tidak selalu berubah melalui satu percakapan, sedangkan ketimpangan posisi sosial dapat membuat sebagian warga memilih diam. Penyebaran pesan di ruang digital juga dapat mengubah cara sebuah ucapan dipahami. Artikel ini menawarkan penjelasan konseptual tentang hubungan etika pesan dengan praktik dialog, bukan bukti bahwa suatu pendekatan dakwah pasti berhasil. Penelitian selanjutnya dapat mengamati percakapan lintas agama secara langsung untuk melihat bagaimana warga menangani ketidaksetujuan dan apakah kesempatan berbicara benar-benar terbuka bagi semua pihak. Keterbatasan ini menjadi dasar untuk merancang pengujian yang lebih terarah.

DAFTAR PUSTAKA

Adiprasetya, J. (2024). Befriending religious others – From religious moderation to religious mediation in Indonesia. *The Ecumenical Review, 76*(5), 488–499. doi.org/10.1111/erev.12885

Agung, D. A. G., Nasih, A. M., Sumarmi, Idris, & Kurniawan, B. (2024). Local wisdom as a model of interfaith communication in creating religious harmony in Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open, 9*, 100827. doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.100827

Anas, M., Saraswati, D., Ikhsan, M. A., & Hakim, M. L. (2026). Local wisdom as social regulation – The role of Anjangsana tradition in shaping interfaith tolerance in rural Indonesia. *Cogent Social Sciences, 12*(1), 2623301. doi.org/10.1080/23311886.2026.2623301

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Dharta, F. Y., Susanto, T., Anggara, R., Hariyanto, F., & Sianturi, H. R. P. (2025). MUI's fatwa on interfaith greetings and religious tolerance – Can Indonesia find a middle ground? *Frontiers in Communication, 10*, 1537568. doi.org/10.3389/fcomm.2025.1537568

Djainudin, H. (2022). The conception of religious moderation in interfaith dialogue in Indonesia – Case study in Flores Nusa Tenggara Timur. *Humanika, 22*(2). doi.org/10.21831/hum.v22i2.54304

Fajri, M. N. (2023). Pola komunikasi efektif dalam moderasi beragama – Membangun dialog harmonis. *Al-Tsiqoh, 8*(1), 13–33. doi.org/10.31538/altsiq.v8i1.3678

Harmadi, M., Ekoliesanto, Y. B., Surya, P. P., & Willyam, V. (2025). Religious moderation in interfaith dialogue – Current challenges and hopes for the future. *Dialog, 48*(2), 248–261. doi.org/10.47655/dialog.v48i2.1224

Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam – Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.

Hendra, T. (2020). Komunikasi Islam pada masyarakat multikultural. *Jurnal Al-Bayan, 26*(1). doi.org/10.22373/albayan.v26i1.7292

Hermawan, A., & Matas, J. A. V. (2024). Religious moderation in shaping interfaith relations – A comparative study of Indonesia and Malaysia. *Religious, 8*(2). doi.org/10.15575/rjsalb.v8i2.20273

Hidayatullah, M. F., Nasih, A. M., Sultoni, A., Ismail, Z., Gümrükçüoğlu, S., & Syamsu, A. (2026). Fostering dialogue, tolerance, and religious harmony in Indonesia through the local tradition of Bersih Desa. *Journal of Al-Tamaddun, 21*(1), 301–316. doi.org/10.22452/JAT.vol21no1.18

Jamal, J., Yaqinah, N., & Malik, A. (2026). Constructing interreligious dialogue through local wisdom for peacebuilding in Nggeru Kopa Hamlet, Indonesia. *Dialog, 49*(1), 233–254. doi.org/10.47655/dialog.v49i1.1049

Jayadi, S., & Ridho, A. R. (2024). Practicing religious moderation among Muslims, Buddhists, and Hindus in North Lombok. *Fikrah, 12*(2), 271–290. doi.org/10.21043/fikrah.v12i2.27903

Kanas, A., Scheepers, P., & Sterkens, C. (2015). Interreligious contact, perceived group threat, and perceived discrimination – Predicting negative attitudes among religious minorities and majorities in Indonesia. *Social Psychology Quarterly, 78*(2), 102–126. doi.org/10.1177/0190272514564790

Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. eperpus.kemenag.go.id/index.php?id=39985&p=show_detail

Lim, M. (2017). Freedom to hate – Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies, 49*(3), 411–427. doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188

Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. *Journal of Personality and Social Psychology, 90*(5), 751–783. doi.org/10.1037/0022-3514.90.5.751

Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah – Wawasan Islam tentang moderasi beragama*. Lentera Hati.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology – An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Ulfain, & Zahrani, S. (2025). Komunikasi dakwah dan inklusi sosial dalam masyarakat multikultural. *Communicative, 6*(1), 167–174. doi.org/10.47453/communicative.v6i1.4251